

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

Muhammad Syafii Maarif^{a,1}, Eny Kusdarini^{b,2},

muhammadsyafii.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

eny_kusdarini@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia merupakan sebuah isu krusial yang telah mendapatkan tempat istimewa dalam konstitusi, menuntut prioritas tinggi dalam distribusi anggaran negara. Setiap unsur dalam sistem pendidikan memegang peranan vital, dengan kurikulum sebagai tonggak utama yang menentukan arah pembelajaran. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa esensi dari pendidikan terletak pada kurikulum, yang menjadi penentu apakah pendidikan dapat memicu pemikiran kritis di kalangan siswa. Penulis berencana untuk menerapkan metode studi literatur untuk mengevaluasi pendidikan nasional dan menilai sejauh mana kurikulum sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi lokal, institusi pendidikan, dan pelajar. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan isu yang diteliti, yang akan digunakan penulis. Kebijakan 'Kampus Merdeka', yang salah satu aspeknya menargetkan kegiatan akademis, memerlukan pemeriksaan dan elaborasi melalui lensa Pendidikan Kewarganegaraan untuk meminimalisir kesenjangan antara idealisme dan realitas. Dalam kerangka 'Kampus Merdeka', diupayakan agar mahasiswa memiliki akses yang lebih luas untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di zaman modern ini adalah untuk mendukung pembentukan literasi digital, kreativitas, inovasi, dan kemampuan kritis siswa. Dinamika kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia mencerminkan respons terhadap kebutuhan dan visi pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi kebijakan kurikulum pendidikan di negara ini. Meskipun demikian, ada elemen-elemen fundamental yang tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, termasuk Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai-nilai, moral, kearifan lokal, dan keberagaman budaya.

ABSTRACT

In Education in Indonesia is a crucial issue that has a special place in the constitution, demanding high priority in the distribution of the state budget. Every element in the education system plays a vital role, with the curriculum as the main milestone that determines the direction of learning. Education experts argue that the essence of education lies in the curriculum, which determines whether education can trigger critical thinking among students. The author plans to apply the literature study method to evaluate national education and assess the extent to which the curriculum is appropriate to local characteristics, conditions and potential, educational institutions and students. Literature study is a method of collecting data and information relevant to the issue under study, which will be used writer. The 'Free Campus' policy, one aspect of which targets academic activities, requires examination and elaboration through the lens of Citizenship Education to minimize the gap between idealism and reality. Within the 'Independent Campus' framework, efforts are made to ensure that students have wider access to master various fields of knowledge. The aim of Citizenship Education in this modern era is to support the formation of students' digital literacy, creativity, innovation and critical abilities. The dynamics of the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) curriculum in Indonesia reflect a response to the needs and vision of the government, which directly influences education curriculum policy in this country. However, there are fundamental elements that remain the basis for implementing Pancasila and Citizenship Education, including Pancasila, the 1945 Constitution, politics, law, values, morals, local wisdom and cultural diversity

Sejarah Artikel

Diterima : 12 Juni 2024

Disetujui: 12 Juni 2024

Kata kunci:

Egalitarian, sikap, penguatan, P5

Keywords:

Egalitarian, attitude, reinforcement, P5

Pendahuluan

Pembahasan mengenai dunia pendidikan akan selalu menjadi topik yang relevan dari masa ke masa. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi prioritas utama dalam anggaran belanja negara. Pendidikan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Pengertian ini sering kali tidak diperhatikan dengan saksama bahwa konstitusi kita mengamanatkan upaya mengembangkan "potensi," yang mencakup banyak aspek, bukan hanya kognitif, tetapi juga psikomotorik dan afektif.

Untuk mengembangkan potensi siswa atau peserta didik, dalam dunia pendidikan diperlukan kurikulum. Asri (2017) menyatakan bahwa "dalam dunia pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling bersinergi agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Semua komponen memiliki peran penting, termasuk kurikulum yang dapat dikatakan sebagai penyangga utama dalam proses belajar mengajar. Beberapa ahli bahkan menyebut bahwa kurikulum adalah jantung pendidikan; baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangun kesadaran kritis pada peserta didik atau tidak."

Pembahasan mengenai kurikulum di Indonesia sangat menarik karena perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum Indonesia sangat dinamis. Raharjo (2020) mengungkapkan bahwa "ada ungkapan yang sering muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni 'ganti menteri ganti kurikulum'. Nyatanya, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan berkali-kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terbaru adalah kurikulum 2013." Selain itu, saat ini sudah ada pandangan baru terkait kurikulum merdeka belajar.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat. Sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun kurikulum itu sendiri, menurut Schubert (1986), dapat dipahami sebagai "konten atau materi pelajaran, program kegiatan yang direncanakan, hasil belajar yang diharapkan, reproduksi budaya, pengalaman, tugas dan konsep terpisah, serta agenda untuk rekonstruksi sosial." Pandangan ini tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya seperti Stratemeyer, Forkner, dan McKim (194) yang menyatakan bahwa "kurikulum didefinisikan dalam tiga cara: kursus dan kegiatan kelas yang diikuti anak-anak dan remaja, seluruh rangkaian pengalaman di dalam dan di luar kelas yang disponsori oleh sekolah, serta pengalaman hidup total dari pembelajar." Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Metode

Penulis akan menggunakan metode studi pustaka (Darmalaksana, 2020). Studi pustaka adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Data dan informasi ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel, dan jurnal. Ketekunan dan ketelitian sangat diperlukan dalam studi pustaka untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi pustaka, peneliti membaca dan menelaah literatur yang relevan dengan topik kajian. Setelah itu, hasil penelaahan dituangkan secara teoritis, khususnya terkait dengan penguatan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.

Penelitian kualitatif tidak terbatas oleh kategori tertentu karena bersifat elaboratif dan mendalam (Rukajat, 2018). Literatur dalam penelitian ini berfokus pada jurnal, didukung oleh sumber yuridis

serta dokumen resmi dari negara dan lembaga resmi, baik nasional maupun internasional. Jurnal dijadikan sumber literasi primer karena memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, sehingga analisis data yang bersifat konseptual dan prosedural dapat terhindar dari kesalahan. Selain itu, data sekunder juga diperlukan untuk mendukung keabsahan data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman (1992), yang mencakup: reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Firman & Rahayu, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler menitikberatkan pada aktivitas pembelajaran, bertujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini penting agar warga negara siap berpartisipasi dalam kepentingan umum, memiliki sensitivitas sosial yang baik, menjaga persatuan nasional, serta aktif mengisi kemerdekaan. Menurut Winataputra dan Budimansyah (Nurdin, 2016), Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengoptimalkan potensi siswa untuk menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan berkomitmen.

Kebijakan kampus merdeka, yang fokus pada kegiatan akademik, harus dianalisis melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menghindari ketimpangan antara tujuan dan kenyataan. Substansi pembelajaran dalam kebijakan ini perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai kajian yang komprehensif, PKn mampu mengevaluasi kebijakan publik, khususnya dalam mengakomodasi partisipasi dan menumbuhkan tanggung jawab publik (Shabrina, 2016).

Dalam konteks pembelajaran kampus merdeka, mahasiswa diberi peluang untuk menguasai berbagai disiplin ilmu. Meskipun PKn sebagai mata kuliah wajib biasanya diambil pada semester awal, prinsip pembelajaran PKn tetap harus hadir, sehingga kampus merdeka dapat menjadi pembelajaran yang demokratis, terstruktur, adil, menyenangkan, dan meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, "pembelajaran di luar program studi dapat dilakukan di program studi lain di kampus yang sama atau berbeda, serta di luar kampus." Keberhasilan kebijakan ini tergantung pada komunikasi antar perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan berperan memberikan informasi objektif mengenai pentingnya hak mahasiswa, memberikan ruang bagi mereka untuk berkarya dan mencari pengalaman, serta mengeksplorasi diri agar hidup mereka lebih bermakna.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era modern adalah mengakomodasi literasi digital, kreativitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik, serta menggunakan permasalahan sosial sebagai sumber pembelajaran kontekstual (Martini, 2018). Dalam konsep kampus merdeka, penguasaan keterampilan beragam ditekankan untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul. PKn bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang beradab (civic virtue) melalui integrasi pendekatan filosofis, teori, dan praktik, agar kebijakan kampus merdeka efektif dan sesuai harapan.

Konsep pembelajaran di pendidikan tinggi menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 adalah "aktualisasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Substansi dan praktik dari kampus merdeka yang sejalan dengan Pendidikan Kewarganegaraan akan dianalisis dan direfleksikan untuk menemukan jawaban ilmiah yang komprehensif". Program seperti pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, dan magang akan dianalisis melalui dimensi PKn kurikuler untuk memperkaya kajian keilmuan.

Kurikulum Merdeka Belajar 2020, yang didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020, diprakarsai oleh Mendikbud Nadiem Makarim, yang menekankan pentingnya kualitas guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, tetapi teknologi digunakan untuk mendukung peran guru. Tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar adalah akselerasi teknologi, keberagaman, dan profil pelajar Pancasila. Keberagaman menekankan pengukuran kinerja siswa tidak hanya berdasarkan akademik tetapi juga aktivitas lain. Profil pelajar Pancasila mencakup bernalar kritis, kemandirian, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural berfokus pada pemberdayaan masyarakat, membentuk kepribadian warga negara, dan sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat umum. Civic education merupakan PKn dalam arti sempit (pendidikan formal), sedangkan citizenship education adalah PKn dalam arti luas (pendidikan non-formal). PKn bertujuan menciptakan masyarakat berdaya dan beradab yang dapat mengoptimalkan potensi di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, demokrasi, dan keamanan.

Dalam konsep kampus merdeka, mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat untuk mewujudkan integrasi sosial dan kesejahteraan umum. Kebijakan kampus merdeka tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga membentuk kompetensi kewarganegaraan yang baik bagi mahasiswa, mencakup civic knowledge, civic disposition, dan civic skills. PKn dalam dimensi sosio-kultural mengakomodasi bentuk pembelajaran seperti wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan KKN tematik, yang relevan dengan konsep economic civic untuk memberdayakan ekonomi masyarakat (Rube'i, 2014).

Simpulan

Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. Sejarah kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia adalah sebuah tapestri yang berwarna-warni dan penuh perubahan. Perkembangan kurikulum yang begitu dinamis ini tidak terlepas dari situasi politik dan hukum di Indonesia. Samsuri (2012) menyatakan bahwa besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap pendidikan kewarganegaraan model PMP mengakibatkan reduksi misi mata pelajaran tersebut dalam membentuk warga negara yang baik. Reduksi ini terlihat ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP seakan-akan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter warga negara, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, akademisi di bidang PPKn harus terus peduli dan menganalisis perkembangan kurikulum PPKn baik secara normatif maupun substantif.

Referensi

- Asri, Muhammad. (2017). *Dinamika Kurikulum Di Indonesia*. Modeling: Jurnal Program Studi Pngmi, 4(2), 192–202.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Firman, Firman, & Rahayu, Sari. (2020). *Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19*. Indonesian Journal Of Educational Science (Ijes), 2(2), 81–89.

- Geboers, Ellen, Geijsel, Femke, Admiraal, Wilfried, & Ten Dam, Geert. (2013). Review Of The Effects Of Citizenship Education. *Educational Research Review*, 9, 158– 173.
- Martini, Eneng. (2018). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *Jpk (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 21–27.
- Mukhtarom, Asrori, Arwen, Desri, & Kurniyati, Ety. (2019). Urgensi Civic Education Dalam Kehidupan Bernegara. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 1(2).
- Nanggala, Agil, & Suryadi, Karim. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10–23.
- Nurdin, Encep Syarief. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik Pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1).
- Raharjo, Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Rahmandani, Fahdian, & Samsuri, Samsuri. (2019). Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 49–59.
- Rube'i, Muhammad Anwar. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Economic Civic (Ekonomi Warganegara): Studi Kasus Pembentukan Ekonomi Warga Negara Di Sma Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach.
- Shabrina, Tasya Fildzah. (2016). Implementasi Gerakan Citarum Bestari Dalam Menumbuhkan Civic Responsibility Terhadap Lingkungan:(Studi Kasus Pada Masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tiara, Monica, & Yarni, Nevi. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di Sma Kota Padang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 2(2), 297–302. Yunita, Yunita, & Suryadi, Karim. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara Sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 5(2), 225–233.